



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IRYANA MARGAHAYU
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 629433

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.840.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m<sup>2</sup>/21 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.060.000.000
2. Tanah Seluas 72 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 237.500.000

1. MOTOR, HONDA 01B02N12L2AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS 1.5L PLUS (4X2) AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 241.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 604.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 2.923.000.000

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.923.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.